

# Analisis Kelayakan Usaha Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Di Desa Induk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Desy Maharani<sup>1,\*</sup>, Endang Sri Wahyuni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Negeri Bengkalis Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Bengkalis, Riau, 28711, Indonesia

<sup>1\*</sup>[dessymaharani2109@gmail.com](mailto:dessymaharani2109@gmail.com), <sup>2</sup>[endang.sri@polbeng.ac.id](mailto:endang.sri@polbeng.ac.id)

## Abstract

*This study aims to analyze the business feasibility of the Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) in Induk Village, Bantan District, Bengkalis Regency, with a focus on assessing the potential for reinvestment from a financial and non-financial perspective. The research method used is a qualitative approach, with primary and secondary data collection through a purposive sampling technique that targets USPs with high capital. The investment feasibility analysis was conducted by reviewing non-financial aspects, including legal, socioeconomic and environmental aspects, market and marketing, and management and human resources. Financial aspects were analyzed using investment evaluation tools such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), and Profitability Index (PI). The results showed that the USP in Desa Induk is feasible from both non-financial and financial aspects. The positive NPV, PI of more than 1, and reasonable PP indicate that the investment is profitable. However, the IRR of only 11% is still below the Minimum Acceptable Rate of Return (MARR) of 13.25%, indicating a need to improve operational efficiency. Nonetheless, the main objective of the USP development focuses more on improving the economic welfare of village communities rather than solely achieving financial returns. The USP development strategy includes a sustainable approach that is oriented towards improving the welfare of the villagers.*

**Keywords:** *Business Feasibility, Savings and Loan Business, Financial Aspects, Non-Financial Aspects*

## 1. Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial yang terjadi di Indonesia, keberagaman wilayah dan kebutuhan masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Indonesia, sebagai negara republik dengan sistem pemerintahan terbuka dan partisipatif, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat mencapai setiap sudut negeri, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal secara mandiri. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat peningkatan ekonomi di seluruh wilayah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meluncurkan program

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. UED-SP merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi lokal, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2011 menggarisbawahi fenomena kemiskinan yang berlawanan dengan kekayaan sumber daya alam di Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis, yang lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural ketimbang kemiskinan alami. Masalah ini menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih terfokus pada masyarakat miskin.

Di Kecamatan Bantan, Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) merupakan program berbasis kerakyatan yang dikembangkan untuk mendukung usaha kecil menengah (UKM) dan meningkatkan ekonomi perdesaan. Program ini telah diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai aset desa

dan menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Namun, USP di Desa Induk Kecamatan Bantan menghadapi berbagai tantangan, terutama peningkatan tunggakan pembayaran yang terjadi sejak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat, berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan efektivitas kegiatan USP.

Permasalahan ini mencakup lemahnya struktur permodalan, akses terbatas terhadap sumber permodalan, serta kelemahan dalam organisasi dan manajemen usaha. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap USP di Desa Induk Kecamatan Bantan untuk menentukan kelayakan pemberian modal kembali oleh Pemerintah Daerah Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prospek usaha USP, menarik dukungan dari warga desa dan pihak lain, serta menjadikannya sebagai sumber pendapatan daerah bagi Desa dan Pemerintah Daerah Bengkalis. Analisis ini akan memberikan wawasan penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pengembangan dan keberlanjutan program Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Bengkalis.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Analisis Kelayakan Usaha

Menurut Suharyanto (2014) kajian kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil dari kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang direncanakan. Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat atau *benefit* ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan. Pada dasarnya

kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada. Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada saat BUMDesa hendak melakukan pengembangan usaha. Adapun Aspek-aspek yang menjadi tolak ukur untuk penilaian kelayakan usaha ini sebagai berikut:

#### a. Aspek Hukum

Kajian aspek hukum untuk menilai kelayakan usaha yang akan diselenggarakan oleh BUM Desa merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Hasil kajian aspek hukum ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya protes warga dan penutupan/pembekuan usaha oleh pemerintah karena pelanggaran hukum positif yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kajian aspek hukum meliputi: bentuk usaha dan perijinannya, kesesuaian usaha bum desa dengan perencanaan pembangunan desa dan status kepemilikan lahan atau lokasi usaha

#### b. Aspek Pemasaran

Dalam aspek SDM merupakan rencana usaha yang akan dijalankan melalui pengembangan BUMDes secara rutin memerlukan kelayakan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Keberadaan SDM hendaknya dianalisis untuk menjawab apakah memiliki SDM yang diperlukan untuk menjalankan unit usaha BUM Desa secara layak. Kajiannya dapat dimulai dari merencanakan siapa yang akan memimpin BUMDes atau unit usaha BUMDes dan siapa yang akan tergabung di dalam timnya. Aspek manajemen untuk membangun usaha didasarkan pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

#### c. Aspek SDM dan Manajemen

Pemasaran adalah sebuah proses dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, segala kegiatan dalam hubungannya dengan pemberian kepuasan

terhadap kebutuhan dan keinginan manusia merupakan bagian dari makna pemasaran. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia. Beberapa hal yang harus dikaji dalam menilai kelayakan usaha yaitu ketepatan produk dengan kebutuhan masyarakat, daya beli masyarakat, jumlah konsumen, kecenderungan permintaan, kesesuaian harga produk, kemudahan mendapat produk dan kemudahan mendapat informasi

#### d. Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Studi aspek ekonomi dan sosial dan Lingkungan bertujuan untuk mengemukakan pengaruh positif terhadap perekonomian dan masyarakat sekitar perusahaan. Pengaruh terhadap perekonomian dilihat dari sisi lokal, regional, dan nasional. Aspek sosial dan ekonomi ini berhubungan erat dengan perindustrian pelayanan yang merata dan adil sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

#### e. Aspek Keuangan

Kajian aspek keuangan dimaksudkan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah usaha akan dapat berlanjut. Kelayakan pengembangan usahanya dihitung dengan menggunakan kriteria-kriteria investasi yaitu *Payback Period*, *Net Present Value*, *IRR* dan *Profitability Indeks*.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Usaha Simpan Pinjam Di Desa Induk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini fokus pada dua Desa Induk di Kecamatan Bantan yang memiliki pendapatan bersih paling tinggi yaitu Desa Bantan Air Sejahtera dan Desa Bantan Jaya. Subjek penelitian meliputi kantor USP di Desa Induk Kecamatan Bantan. Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak terkait di USP. Data sekunder mencakup profil USP dan laporan keuangan. Menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dari entitas terkait. Menggunakan analisis kualitatif untuk aspek non-finansial dan analisis kuantitatif untuk aspek finansial, termasuk perhitungan PV, NPV, IRR, dan *Payback Period*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Aspek-Aspek Kelayakan Usaha

Berdirinya USP di Desa Induk, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan ekonomi desa secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, USP hadir sebagai agen perubahan yang membawa inovasi ke dalam struktur ekonomi desa. Dalam memperoleh dana ini dan memberikan ke masyarakat. Langkah utama yang harus dilakukan oleh pihak USP, karna pemanfaat pinjaman merupakan sumber dana bagi USP. Salah satu produk USP adalah produk kredit pinjaman. Kredit pinjaman merupakan pembiayaan yang diberikan kepada sejumlah pelaku ekonomi mikro yang akan mengembangkan usahanya. Aspek kelayakan usaha Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Induk Kecamatan Bantan yang terdiri dari dua desa yang menjadi pusat peneliti yaitu USP Bantan Air Sejahtera dan USP Bantan Jaya yang perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan keberhasilan dan

keberlanjutannya. Ada beberapa aspek kelayakan usaha yang menjadi dasar tolak ukur dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemberian modal kembali dalam Unit Simpan Pinjam di Desa Induk Kecamatan Bantan yang perguliran dana dari program tersebut tidak berjalan lagi oleh pemerintah hal itu menjadikan modal USP menjadi terhambat. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha simpan pinjam Kembang Luar untuk pengambilan keputusan kelayakan investasi antara lain sebagai berikut :

a. Aspek Hukum

USP Desa Induk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku. Legalitas tanah dan bangunan telah dipastikan, dan seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan hukum. Kepatuhan ini menjadi sebagai contoh yang baik dalam mengelola lembaga keuangan mikro yang aman dan stabil. USP adalah lembaga yang mematuhi prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkalis yang mengelola dana Unit Simpan Pinjam, mereka tidak perlu izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena tunduk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan pada UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Rencana usaha USP Muntai Maju dan USP Kembang Luar akan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan fokus pada layanan jasa dan usaha lainnya, seluruh pengurus dan pengelola usaha berasal dari dalam desa, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berakar pada kebutuhan dan potensi lokal dan dari segi status lahan dan tanah hingga bangunan merupakan milik desa dan mematuhi data pribadi

sebagai standart perlindungan pemanfaat pinjaman dengan baik.

b. Aspek Pemasaran

Pelayanan yang ditawarkan oleh USP Desa Induk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pemanfaat pinjaman. Transparansi dalam informasi terkait modal, persyaratan pinjaman, dan tingkat bunga menjadi prioritas utama. Pelayanan yang baik dan komunikasi yang jelas telah membantu dalam membangun loyalitas dan hubungan yang positif dengan pemanfaat pinjaman, meskipun ada beberapa tantangan seperti tunggakan yang harus diperhatikan. Dalam aspek pemasaran yang efektif tidak hanya menciptakan kesadaran pemanfaat pinjaman, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Dengan berpegang teguh pada aspek peraturan yang berlaku, USP berhasil membentuk citra positif di masyarakat.

c. Aspek SDM Dan Manajemen

Pengelolaan SDM di USP Desa Induk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis fokus pada rekrutmen yang ketat, pengembangan staf, dan pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja. Komunikasi internal yang efektif dan perencanaan strategis jangka panjang juga diutamakan untuk memastikan bahwa semua staf memahami tujuan organisasi dan dapat berkontribusi secara maksimal. Setiap anggota tim tidak hanya memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemanfaat pinjaman dan menjalankan operasional dengan efisiensi. Pengembangan usaha USP direncanakan dengan baik dengan peraturan. USP juga memiliki asas dan struktur organisasi yang efektif dan efisien. pembagian tugas dan tanggung jawab antara staf dan manajemen USP berdasarkan peraturan yang berlaku. Fungsi-fungsi pengendalian dan

pengawasan terhadap usaha yang akan dikelola oleh USP apakah berjalan dengan baik oleh pendamping desa serta BUMDesa dan usaha yang akan dikelola USP didukung oleh orang-orang yang terampil dan berkompeten untuk mengelola kegiatan usaha.

d. Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan

USP Desa Induk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis telah berkontribusi secara signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah, USP membantu masyarakat dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi lokal. USP juga berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Melalui pinjaman yang disediakan, memberikan dorongan kepada peminjam untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Kegiatan usaha ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Desa (kepala desa) dan/atau Pemerintah Kabupaten (Bupati).

e. Aspek Keuangan

Hal yang dilakukan selanjutnya analisis kelayakan finansial untuk mengevaluasi potensi pengembangan lebih lanjut dari unit simpan pinjam di USP Desa Induk Kecamatan Bantan. Sumber Dana USP Desa Induk, Kecamatan Bantan berasal dari pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Analisis kelayakan finansial sedang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan pengembangan lebih lanjut dari unit simpan pinjam Dalam analisis ini, dipertimbangkan aliran kas, biaya investasi, biaya operasional,

pendapatan, *payback period*, NPV, IRR, dan *Profitability Index* (PI).

1) Biaya investasi

Biaya investasi jumlah dana yang dikeluarkan sekali untuk memperoleh manfaat ekonomis dari proyek tersebut tidak menghasilkan manfaat lagi. Biasanya, biaya investasi mencakup semua pengeluaran awal yang diperlukan untuk membangun atau mengembangkan proyek.

**Tabel 1. Biaya Investasi USP Di Desa Induk**

Usaha Simpan Pinjam	Biaya Investasi
Bantan Air Sejahtera	140.095.604, 00
Bantan Jaya	70. 229.777,00

Sumber Data Olahan, 2024

Biaya investasi diatas berasal dari laba pada tahun 2023.

2) Perkiraan pendapatan tahun 2025

a) Biaya operasional

Untuk unit simpan pinjam di USP Di Desa Induk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis biaya operasional terdiri dari sejumlah pengeluaran yang diperlukan selama operasional berlangsung yang didapaykan melalui pemotongan tiga jenis biaya utama yang harus dipertimbangkan dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 2. Perhitungan Biaya Operasional**

Pendapatan Bunga Bulan Januari
Pajak 0,5 %
Permaneh hadiah 10%

Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil perhitungan dari biaya perkiraan pendapatan tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3. Perkiraan pendapatan bersih tahun 2025**

Usaha Simpan Pinjam	Pendapatan Bersih
Bantan Air Sejahtera	11.137.600,52
Bantan Jaya	5.583.267,27

Sumber data olahan, 2024

b) Pendapatan bersih

Pendapatan bersih dari unit usaha dapat dihitung dengan mengakumulasi total uang yang

dikeluarkan untuk memberikan pinjaman kepada pemanfaat pinjaman pada tahun 2023, kemudian mengalikannya dengan suku bunga pinjaman sebesar 10% per tahunnya.

3) Metode penilaian arus kas

Untuk memperoleh hasil perhitungan penilaian nilai sekarang dalam Usaha Simpan Pinjam dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan arus kas untuk mencari penilaian kelayakan usaha. Berikut adalah perhitungan metode penilaian investasi tabel dibawah ini menyajikan informasi mengenai metode penilaian investasi yang digunakan, beserta hasil perhitungan yang relevan sebagai berikut :

**Tabel 4. Perhitungan metode penilaian investasi**

Usaha Simpan Pinjam	PP	NPV	IRR	PI
Bantan Air	8,5	79.494.291,51	11%	1,5
Bantan Jaya	8,5	40.332.237,99	11%	1,5

Sumber : Data olahan, 2024

Berdasarkan *Payback Period* waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas bersih yang dihasilkan. Dalam kasus ini, *payback period* adalah 8,5 tahun, artinya modal awal yang diinvestasikan akan dikembalikan dalam waktu sekitar 8 tahun 6 bulan. NPV yang menunjukkan bahwa nilai proyek ini lebih besar dari nol, sehingga dapat dianggap layak untuk dilakukan. IRR dari investasi ini adalah 11%. IRR dari 11% lebih rendah dari MARR (*Minimum Acceptable Rate of Return*) sebesar 13,25%. yang diperoleh dari penjumlahan tingkat inflasi (3%), tingkat investasi (5%), tingkat risiko, dan bunga deposito (5,25%). Ini berarti secara finansial, metode ini netral karena bukan factor utama dalam studi kelayakan. *Profitability Index* ini mengukur rasio manfaat terhadap biaya dari investasi,

dengan PI sebesar 1,5 menunjukkan bahwa manfaat yang diharapkan dari investasi ini dua kali lipat dari biayanya dari tabel diatas. menunjukkan bahwa investasi ini layak untuk dipertimbangkan.

**4.2 Strategi dalam meningkatkan permodalan**

Dalam upaya mengoptimalkan potensi investasi pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Induk, Kecamatan Bantan, telah dirancang sejumlah strategi yang terencana dan berkelanjutan untuk setiap unit. USP berfokus pada peningkatan akses keuangan yang terjangkau dan kolaborasi dengan pemerintah serta organisasi non-pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi desa. Sementara itu, USP mengimplementasikan strategi survei berkala terhadap peminjam dan monitoring kinerja untuk meningkatkan layanan dan profitabilitas usaha.

**5. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan analisis di atas, USP Bantan Air Sejahtera dan USP Bantan Jaya keduanya menunjukkan kelayakan yang tinggi dalam semua aspek yang dianalisis, yaitu aspek hukum, pemasaran, SDM dan manajemen, ekonomi, sosial, lingkungan, serta keuangan. Kedua unit ini tidak hanya memenuhi syarat dari segi legalitas dan operasional, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengembangan dan investasi di kedua unit usaha simpan pinjam ini layak untuk dilanjutkan.

**Daftar Pustaka**

A Indra. (2022). Analisis Kelayakan Usaha Minuman Daeng Fruit’s Di Makassar (Doctoral dissertation, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*

Alexander, A. d. (2023). ). Analisis Kelayakan Investasi Saham Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt.

- Kino Indonesia.Tbk). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*.
- Bengkalis.go.id. (2023). *perangkat daerah kecamatan bantan*. Retrieved Juni 11, 2023, from bengkalis.go.id: <http://bengkalis.go.id/perangkat-daerah/kecamatan-bantan>.
- Brigham, E. F. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen keuangan*. Jakarta: Salemba empat.
- Dyckman, d. (2001). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Fatihudin, D. (2020). *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*. Edisi Revisi: Zifatama Pulisher.
- Fauzi, R. (2022). *Analisa Kelayakan Investasi Proyek Penggantian Secondary Crusher Pada Pt Berau Coal Site Binungan*. *Sebatik*.
- Fakhrudin H. (2008). *Istilah Pasar Modal A-Z*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haming, B. D. (2010). *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Harahap, S. S. (2006). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hasan, M. (2013). *Capital Budgeting Techniques Used by Small Manufacturing Companies*. *Journal of Service Science and Management*.
- Hazen, G. (2009). *An Extension of the Internal Rate of Return to Stochastic Cash Flows*. *Journal of Management Science*.
- Jakfar, K. d. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Bogor: Kencana.
- Jakfar, K. d. (2007). *Studi Kelayakn Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jakfar, K. d. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta : Kencana
- Mawardi, Q. (2019). *Analisis Kajian Kelayakan Usaha Bumdes “Beriuk Berkarya” Desa Lando Unit Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Desa Serta Perannya Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*, *Jurnal pendidikan dan kewirausahaan*.
- Milana, W. d. (2018). *Analisis Kelayakan Investasi Dendeng Daging Sapi (Studi Kasus di PD “Carole Jaya”*. *Jurnal Riset jBisnis dan Investasi*.
- Nadiasa, M. (2010). *Analisis Investasi Pengembangan Potensi Pariwisata Pada Pembangunan Waduk Jehem di Kabupaten Bangli*.
- Nanda, J. J. (2024). *A Feasibility Study of Bumdes in the Bengkalis District (Case Study at BUMDES Unggul Sari, Wonosari Village)*. *Jurnal Inovasi Bisnis Seri Manajemen , Investasi dan Kewirausahaan*.
- Nara, Y. M. (2018). *Analisis Kelayakan Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Lasiana*. *Skrispi* .
- Norhalima, R. B. (2014). *Analisis Kelayakan Investasi Perkebunan Rambutan di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan*. *Jurnal Sains STIPER Amuntai*.
- Suharyanto, H. d. (2014). *Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan*

*Usaha Bum Desa. Seri Buku Pinter  
BUMDesa.*

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014  
Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 06 Tahun 1998  
Tentang Usaha Ekonomi Desa  
Simpan Pinjam (UED-SP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
52 Tahun 2012 tentang Pedoman  
Pengelolaan Investasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2021 tentang  
Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDes).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis  
Nomor: No 71 tahun 2017 Tentang  
Pedoman Penyertaan Modal  
Pemerintah Desa Ke BUMDes  
yang berasal dari dana Usaha  
Ekonomi Desa.